

**PENANAMAN NILAI-NILAI ANTIKORUPSI
DI SMA NEGERI 3 PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang*



**Oleh :
EZY ULANDARI
1302152 / 2013**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2018**

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Sosial Politik
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang
Pada Hari Kamis Tanggal 18 Januari 2018 Pukul 10.00 s/d 12.00 WIB

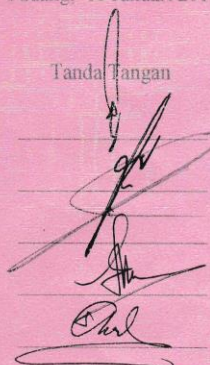
Penanaman Nilai-Nilai Antikorupsi Di SMA Negeri 3 Padang

Nama : Ezy Ulandari
TM / Nim : 2013 / 1302152
Progam Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 18 Januari 2018

Nama : Tim Penguji
Ketua : Drs. Suryanef, M. Si
Sekretaris : Dr. Junaidi Indrawadi, M. Pd
Anggota : Prof. Dr. Azwar Ananda, MA
Anggota : Dr. Maria Montessori, M.Ed, M.Si
Anggota : Dra. Aina, M. Pd

Tanda Tangan



Mengesahkan :
Dekan FIS UNP
Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd
NIP: 196210011989031002

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Penanaman Nilai-Nilai Antikorupsi Di SMA Negeri 3 Padang

Nama : Ezy Ulandari

TM/ NIM : 2013 / 1302152

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Jurusan : Ilmu Sosial Politik

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 6 November 2017

Disetujui Oleh :

Pembimbing I


Drs. Suryanef, M. Si
NIP. 19640606 199103 1 006

Pembimbing II


Dr. Junaidi Andrawadi, M. Pd
NIP. 19750601 200604 1 001

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : EZY ULANDARI
Nim/Tahun Masuk : 1302152/2013
Program Studi : Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan
Jurusan : Ilmu Social Politik
Fakultas : Ilmu Social

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Penanaman Nilai-Nilai Antikorupsi Di SMA Negeri 3 Padang”** adalah benar merupakan hasil karya saya dan bukan merupakan plagiat orang lain, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku, baik di instansi unp maupun di masyarakat dan Negara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, 09 januari 2018
Saya yang menyatakan



EZY ULANDARI
Nim. 1302152/2013

ABSTRAK

Ezy ulandari.2013/1302152 : Penanaman Nilai-Nilai Antikorupsi di SMA Negeri 3 Padang

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh program penanaman nilai-nilai antikorupsi yang belum optimal dan efisien terlihat dari adanya guru yang belum mengimplementasikan nilai-nilai antikorupsi dalam mata pelajaran yang diajarkan serta tidak semua warga sekolah ikut dalam program penanaman nilai-nilai antikorupsi.. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan bagaimana penanaman nilai-nilai antikorupsi di SMA N 3 Padang. Dalam penelitian ini yang dibahas adalah bagaimana bentuk serta upaya yang dilakukan sekolah dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi kepada siswa.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder, dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi. Teknik analisis data melalui cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penanaman nilai-nilai antikorupsi dilakukan melalui dua bentuk penanaman, yang pertama melalui kegiatan kurikuler yaitu melalui pengintegrasian dalam mata pelajaran PPKn, Bahasa Indonesia, dan Agama. Kedua melalui kegiatan ekstrakurikuler berupa OSIS, Pramuka, dan PIK-R. Upaya penanaman nilai-nilai antikorupsi dilakukan dengan pembuatan kantin kejujuran dengan menanamkan sikap jujur dan tanggung jawab terhadap siswa, pengadaan seminar antikorupsi dengan tujuan mensosialisasikan nilai-nilai antikorupsi serta memberikan edukasi terhadap warga sekolah tentang korupsi. Pengadaan lomba yang bertemakan pendidikan antikorupsi dilakukan oleh sekolah untuk membentuk budaya sekolah yang anti terhadap korupsi. Tanggapan warga sekolah terhadap penanaman nilai-nilai antikorupsi sangat baik dan memberikan komentar yang positif.

ABSTRACT

Ezy ulandari. 2013/1302152: Implementation of Anti-Corruption Values in SMA Negeri 3 Padang

This research is motivated by the program of anti-corruption values that have not been optimally and efficiently seen from the teachers who have not implemented anti-corruption values in the subjects taught and not all the school residents participate in the program of anti-corruption values. This research is to describe how to implement anti-corruption values in SMA N 3 Padang. In this study discussed is how the form and effort made by schools in instilling anti-corruption values to students.

This type of research is qualitative. The selection of informants was done by purposive sampling technique. This type of data consists of primary data and secondary data, collected through observation, interview and documentation study. Test the validity of the data using triangulation. The data analysis techniques through data collection, data reduction, data presentation and conclusion.

The results show that the implementation of anticorruption values is done through two forms of planting, the first through curricular activities is through integration in the subjects of civics education, Indonesian, and Religion. Second through extracurricular activities such as OSIS, Scouts, and PIK-R. Efforts to implement the values of anti-corruption is done by making honesty canteen by inculcating honest attitude and responsibility towards students, anti-corruption forum with the goal of discuss about anti-corruption values and educating the students of the school about corruption. The performance of anti-corruption education-themed competitions is conducted by schools to establish a school culture that is anti-corruption. The response of students at school to the implementation of anti-corruption values is very good and provide positive comments.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“Penanaman Nilai-Nilai Antikorupsi di SMA Negeri 3 Padang”**. Tak lupa shalawat dan salam senantiasa selalu tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman yang berpendidikan.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Selama penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang selalu mendukung penulis baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dengan ketulusan hati penulis ingin menyampaikan penghargaan dan mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Usman dan Ibunda Elnisuarti yang telah memberikan dorongan dan doa kepada penulis sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Ganefri, M.Pd, Ph.D sebagai Rektor Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial yang telah memberikan izin dan kemudahan dalam pelaksanaan penulisan.

4. Ibu Dr. Fatmariza, M.Hum dan bapak Dr. Junaidi Indrawadi, M.Pd selaku ketua dan sekretaris Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang telah memberikan izin kepada Penulis dalam menulis skripsi ini.
5. Bapak Drs. Suryanef, M. Si selaku Pembimbing I dan bapak Dr. Junaidi Indrawadi, M.Pd selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Prof. Dr. Azwar Ananda, MA, Ibu Dr. Maria Montessori, M. Ed, M.Si dan Ibu Dra. Aina, M. Pd selaku Tim Penguji yang telah memberikan banyak masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.
7. Dr. Maria Montessori, M. Ed, M. Si selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan berbagai macam nasehat selama perkuliahan hingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu staf pengajar dan kepustakaan pada Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
9. Bapak Drs. Ramadansyah, M. Pd, Ibuk Dra. Azhira, M. Pd, bapak Deswandi, S. Pd, Ibuk Dra. Ifna Sukmi, M. Pd, bapak Walmukminin, M. Pd, Bapak Drs. Jajang Sumitra, Ibuk Ratna Sari, S. Pd, Ibuk Dra. Zurni Bachtiar, Bapak Evidel, S. Pd, ibuk Silfia Netri, S. Pd serta siswa SMA Negeri 3 Padang yang telah membantu dalam penelitian.
10. Teman-teman PPKn 2013 dan senior PPKn serta Junior yang telah banyak membantu.

11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis menerima kritik dan saran yang membangun/konstruktif guna kesempurnaan skripsi ini. Akhirulkalimat, penulis ucapkan terimakasih.

Padang, 18 Januari 2018

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi, batasan dan rumusan Masalah	8
1. Identifikasi Masalah.....	8
2. Batasan Masalah.....	8
3. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori	11
1. Pendidikan Antikorupsi.....	11
a. Pengertian Korupsi.....	11
b. Pengertian Pendidikan Antikorupsi.....	13
c. Tujuan Pendidikan Antikorupsi	14
d. Urgensi Pendidikan Antikorupsi	16
e. Nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi	18
2. Strategi dan Implementasi Pendidikan Antikorupsi.....	25
a. Pengintegrasian dalam Mata Pelajaran	25
b. Membangun Budaya Antikorupsi dalam Seluruh Aktivitas Sekolah	26
c. Penguatan Melalui Kegiatan Ektrakurikuler.....	26
d. Pengembangan dalam Kegiatan Kesiswaan.....	27

B. Kerangka Konseptual	33
BAB III METODOLOGI	
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Lokasi Penelitian.....	36
C. Informan Penelitian.....	36
D. Jenis, sumber, teknik dan alat pengumpul data.....	37
1. Jenis dan sumber data.....	37
2. Teknik Pengumpulan Data	38
3. Alat Pengumpulan Data	39
E. Teknik Analisis Data.....	40
F. Keabsahan Data.....	42
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN	
A. Temuan Umum	44
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	44
2. Struktur Organisasi SMA Negeri 3 Padang	47
3. Visi dan Misi SMA Negeri 3 Padang	48
B. Temuan Khusus	49
1. Bentuk Penanaman Nilai-Nilai Antikorupsi	52
2. Upaya Penanaman Nilai-Nilai Antikorupsi	70
3. Tanggapan Warga Sekolah Tentang Penanaman Nilai-Nilai Antikorupsi	79
C. Pembahasan	82
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	92
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA.....	94

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Indeks persepsi korupsi (IPK) Negara di asia tenggara	1
2. Daftar informan penelitian	36
3. Jumlah siswa SMA N 3 Padang menurut jurusan dan kelas	44
4. Sarana dan prasarana SMA N 3 Padang	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Konseptual	34
2. Struktur Organisasi SMA Negeri 3 Padang	47
3. PBM PPKn di kelas XI IPS 2	57
4. Penampilan drama kelas XI IPS 1	59
5. Proses pembelajaran Agama di kelas X MIPA 1	60
6. Poster dipintu masuk SMA N 3 Padang	77
7. Mading yang diperlombakan	78

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Pedoman wawancara	96
2. Gambar wawancara dengan informan penelitian	98
3. Gambar kegiatan PAK	100
4. Izin Penelitian	103
5. Izin Penelitian	104
6. Keterangan Penelitian	105

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam era globalisasi, tantangan terbesar bangsa Indonesia muncul dari dalam, yaitu korupsi. Sehingga korupsi berdampak terhadap perekonomian bangsa dengan lemahnya pertumbuhan ekonomi dan investasi, harga barang menjadi mahal dengan kualitas yang buruk, meningkatnya hutang negara, pengentasan kemiskinan berjalan lambat dan buruknya kualitas pelayanan publik. Upaya pemberantasan korupsi terus dilaksanakan namun belum menunjukkan hasil yang optimal. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia terus meningkat hal ini terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1
Indek Persepsi Korupsi (IPK) Negara di Asia Tenggara

No	Negara	CPI 2015	Peringkat 2015	CPI 2014	Peringkat 2014
1	Kamboja	21	150	21	156
2	Myanmar	22	147	21	156
3	Laos	25	139	25	145
4	Timor Leste	28	123	28	133
5	Vietnam	31	112	31	119
6	Philipina	35	95	38	85
7	Indonesia	36	88	34	107
8	Thailand	38	76	38	85
9	Malaysia	50	54	52	50
10	Singapura	85	8	84	7

Sumber: <http://www.transparency.org/research/cpi/overview>

Berdasarkan tabel Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dikeluarkan oleh *Transparency International* (TI) pada tahun 2015 dari 168 negara yang disurvei, Indonesia menduduki peringkat 88 dengan corruption perception index (CPI) 36 meningkat 2 point dari tahun 2014.

Menurut Wc Walters dalam Maria Montessori (2013:47) Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*), karena korupsi terjadi di semua bidang kehidupan, dan dilakukan secara sistematis, sehingga sulit untuk memberantasnya. Korupsi di Indonesia sudah merupakan *endemic, sistemic, dan widespread*. Korupsi bahkan sudah merampas hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (ekosob) masyarakat banyak, sehingga harus diberantas.

Ketidakjujuran dan kemunafikan tersebut merupakan awal dari sikap korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bangsa Indonesia mengalami penyakit yang luar biasa bahayanya apabila sikap ketidakjujuran dan kemunafikan tersebut dibiarkan.

Menurut Agus Wibowo (2013:9) menyatakan bahwa:

“Secara nyata, ketidakjujuran telah menggiring bangsa Indonesia pada perjalanan hidup yang kian rumit, berbelit, meniadakan orientasi dan visi nan jelas. Meminjam istilah Limas Sutanto, membenamkan bangsa Indonesia ke disorientasi dan ketiadaan visi yang memusingkan dan memuakkan. Pada akhirnya, membawa bangsa ini pada perputaran-perputaran roda kehidupan yang mengejawahtahkan kemandekan sekaligus kemunduran”.

Korupsi juga berdampak buruk terhadap perekonomian bangsa dan negara, yang pada gilirannya berakibat pada krisis moral dan akhlak bangsa. Kenyataan membuktikan bahwa akibat korupsi adalah tidak tercapainya tujuan dibentuknya negara ini, minimnya hasil pembangunan yang dinikmati rakyat banyak, serta ketidakadilan. Korupsi di Indonesia terjadi dalam semua bidang kehidupan, baik politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Apapun izin yang harus diurus meminta biaya tambahan agar dapat selesai dengan cepat. Bahkan dalam bidang penegakan hukum juga banyak yang terjadi di negara Indonesia. Korupsi terjadi mulai dari korupsi kecil-kecilan seperti pemberian uang pelicin sampai korupsi besar-besaran

seperti kasus penyelewengan dana wisma atlet yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan sendiri. Hal ini terbukti dari survei *Transparency International* (TI) yang mempublikasikan lembaga-lambaga terkorup dalam persepsi masyarakat serta bagaimana para pelaku menganggap semua perilaku koruptif ini terjadi secara kasat mata.

Menurut Siska Elvandari (2007:144) di lain pihak masyarakat pada umumnya tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang korupsi. Bahkan kebanyakan masyarakat umum memiliki persepsi yang salah tentang korupsi, yaitu:

1. Bahwa korupsi hanya bisa dilakukan oleh pejabat atau pegawai negeri.
2. Bahwa korupsi adalah perbuatan mengambil uang negara.
3. Bahwa korupsi adalah urusan penegak hukum.
4. Pegawai negeri yang menerima komisi dalam pekerjaan mereka bukanlah korupsi.
5. Menerima hadiah dari orang yang berurusan dengan kita (karena pekerjaan), setelah pekerjaan selesai, adalah ucapan terimakasih.
6. Membayar lebih untuk urusan SIM, KTP, dan surat-surat lain adalah hal biasa.

Hal-hal di atas yang selalu terjadi dalam interaksi masyarakat, yang dianggap wajar, sesungguhnya adalah korupsi. Pemahaman yang keliru tentang tindakan di atas menyebabkan, warga masyarakat tidak bisa menerima jika kemudian di antara mereka menjadi tersangka korupsi karena melakukan hal yang sudah dianggap biasa tadi.

Mencermati parahnya penyakit korupsi di Indonesia mengharuskan berbagai upaya dilakukan untuk menghapuskannya. Menurut *Transparency*

International (TI) upaya untuk memberantas korupsi bisa dilakukan melalui tiga kerangka utama yaitu pencegahan (*prevention*), pendidikan (*education*), dan penegakan hukum (*law enforcement*). Menurut Aditjondro (dalam Maria Montessori, 2013:4) perlunya usaha yang holistik dalam pemberantasan korupsi baik dari segi aparat penegak hukum, perumusan kebijakan, pengelolaan negara, sampai ke pendidikan disekolah.

Untuk itu, penanganan korupsi juga harus diikuti dengan upaya pencegahan (*preventif*). Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melalui jalur pendidikan. Jalur pendidikan formal merupakan salah satu strategi yang diharapkan mampu mencegah perilaku korupsi karena pendidikan merupakan upaya untuk mengubah pola pikir dan perilaku seseorang yang awalnya buruk menjadi baik dengan cara pembinaan dan penanaman nilai-nilai anti korupsi. Untuk itu, pendidikan seharusnya ditempatkan pada garda terdepan untuk mencegah membudayanya perilaku korupsi.

Salah satu wujud perhatian pemerintah terhadap bahaya korupsi adalah menetapkan kebijakan tentang pemberantasan korupsi yang dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Pada bagian Diktum ke-11 (Instruksi Khusus) poin ketujuh menugaskan kepada Menteri Pendidikan Nasional (sekarang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) untuk menyelenggarakan pendidikan yang bersubstansikan penanaman, semangat dan perilaku antikorupsi baik pada jenjang pendidikan formal maupun nonformal. Hal ini diperkuat dengan dikeluarkannya

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012.

Pendidikan antikorupsi adalah tindakan untuk mengendalikan atau mengurangi korupsi dan sebagai upaya untuk mendorong generasi-generasi mendatang mengembangkan sikap menolak dengan tegas setiap bentuk tindak korupsi. Penerapan nilai-nilai pendidikan antikorupsi sangat penting dilakukan dengan harapan agar generasi muda secara sadar dan bertanggung jawab mampu untuk mencegah perbuatan korupsi bahkan dapat memberantas perilaku korupsi.

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal sangat berperan untuk mencegah terjadinya perbuatan korupsi dan menanamkan nilai-nilai dan sikap antikorupsi terhadap siswanya. Maka sekolah wajib untuk menerapkan nilai-nilai antikorupsi. Penerapan pendidikan antikorupsi di sekolah diharapkan dapat meningkatkan karakter siswa. Penerapan pendidikan antikorupsi di sekolah akan memberikan kesadaran kepada generasi muda akan bahaya korupsi serta perlu mengatasinya.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2013 menetapkan 3 sekolah yang menjadi pilot proyek pendidikan antikorupsi di Sumatera Barat yaitu Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Padang, Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Bukittinggi dan Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Solok. Di SMA Negeri 3 Padang di resmikan langsung oleh bapak Irwan Prayitno selaku Gubernur Sumatera Barat ditandai dengan pemasangan pin antikorupsi di pakaian warga sekolah (www.nusantaranews.net). Hal yang sama seperti dikutip dari www.minangkabaunews.com SMA Negeri 3 Padang adalah salah satu dari 3

sekolah yang di tunjuk menjadi pilot pelopor pendidikan antikorupsi di Sumatera Barat dan satu-satunya sekolah terpilih di Kota Padang

Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Padang adalah salah satu lembaga pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan bagi generasi muda penerus bangsa di masa yang akan datang. Wawancara dengan pihak sekolah SMA Negeri 3 Padang yaitu bapak Walmukminin pada 23 April 2016 mengatakan bahwa penanaman nilai antikorupsi telah dimulai dari tahun 2013 sampai saat sekarang, adapun bentuk kegiatan pendidikan antikorupsi yang telah dilaksanakan oleh sekolah berupa seminar/workshop dengan mendatangkan narasumber dari pihak kepolisian, komisi pemberantasan korupsi, dan kejaksaan. Selanjutnya berupa kegiatan lomba debat antar siswa yang diikuti oleh beberapa sekolah menengah atas yang bertemakan pendidikan antikorupsi dan diselenggarakan oleh SMA Negeri 3 Padang.

Kegiatan lain yang dilakukan yaitu lomba karya tulis, baca puisi dan pembuatan film yang bertemakan pendidikan antikorupsi antar siswa SMA Negeri 3 Padang dan kegiatan lainnya yang telah dilakukan yaitu pembuatan slogan antikorupsi, pembuatan madding khusus berisi artikel antikorupsi dan pengembangan website sekolah yang berisikan tentang program pendidikan antikorupsi serta kegiatan kampanye pendidikan antikorupsi dilingkungan sekolah melalui pembuatan sejumlah pos manajemen sekolah yang memuat pendidikan antikorupsi serta pembuatan kantin kejujuran.

Adapun output dari kegiatan-kegiatan program pendidikan antikorupsi yaitu semua guru dapat mengintegrasikan pendidikan antikorupsi pada setiap mata

pelajaran, semua warga sekolah dapat menanamkan nilai-nilai pendidikan antikorupsi, siswa dapat mengetahui permasalahan dampak korupsi dan pemecahannya, serta terbentuknya persamaan persepsi terhadap dampak korupsi dalam kehidupan sekolah serta warga sekolah dan masyarakat dapat mengakses dan mengevaluasi kegiatan yang dilakukan sekolah dan menghubungkan dengan pendidikan antikorupsi.

Diantara kegiatan yang telah dilaksanakan diatas dari hasil wawancara pada tanggal 23 april 2016 dengan guru SMA Negeri 3 Padang yaitu Bapak Walmukminin mengatakan bahwa pelaksanaan kegiatan pendidikan antikorupsi terus dilaksanakan sampai saat ini walaupun ada sebagian kegiatan yang belum terlaksana secara optimal untuk menumbuhkan nilai antikorupsi kepada seluruh warga sekolah. Misalnya dalam pelaksanaan kegiatan seminar/workshop tidak semua tenaga pendidik/tenaga kependidikan dan siswa yang menghadiri kegiatan tersebut dan belum semua guru mengimplementasikan nilai-nilai antikorupsi pada setiap mata pelajaran. Adapun mata pelajaran yang telah mengimplementasikan pendidikan antikorupsi diantaranya mata pelajaran Pendidikan Agama, mata pelajaran PPKn dan mata pelajaran Bahasa Indonesia.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan antikorupsi tersebut menimbulkan berbagai kendala dalam pelaksanaannya sehingga belum optimal dalam menumbuhkan nilai-nilai antikorupsi pada setiap warga sekolah seperti nilai kejujuran, nilai kepedulian, nilai kemandirian, nilai kedisiplinan, nilai tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, serta keadilan.

Oleh sebab itu dari paparan di atas menurut penulis bahwa masalah tersebut layak untuk diteliti dan penulis berharap dapat meneliti lebih lanjut tentang bagaimana *penanaman nilai-nilai anti korupsi di SMA Negeri 3 Padang*.

B. Identifikasi Masalah, Batasan Masalah dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka identifikasi masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Belum terlaksana secara efisien program seminar/workshop pendidikan antikorupsi terlihat adanya siswa, guru dan pihak sekolah lainnya yang belum ikut serta dalam kegiatan tersebut.
- b. Belum terlaksana secara efisien program implementasi nilai-nilai antikorupsi pada setiap mata pelajaran terlihat dari adanya guru yang belum mengimplementasikan nilai-nilai antikorupsi dalam mata pelajaran yang di bimbingnya.

2. Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terfokus, maka penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti hanya tentang *penanaman nilai-nilai antikorupsi di SMA Negeri 3 Padang*.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk penanaman nilai-nilai antikorupsi di SMA Negeri 3 Padang ?

2. Bagaimana upaya yang dilakukan SMA Negeri 3 Padang dalam mewujudkan penanaman nilai-nilai antikorupsi ?
3. Bagaimana tanggapan warga sekolah tentang penanaman nilai-nilai antikorupsi di SMA Negeri 3 Padang ?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa tentang:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana bentuk penanaman nilai-nilai antikorupsi di SMA Negeri 3 Padang.
2. Untuk mengidentifikasi bagaimana upaya yang dilakukan SMA Negeri 3 Padang dalam mewujudkan penanaman nilai-nilai antikorupsi
3. Untuk mendeskripsikan tanggapan warga sekolah terhadap penanaman nilai-nilai antikorupsi

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan fokus penelitian yang telah diungkapkan diatas, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang Pendidikan, khususnya Pendidikan Kewarganegaraan yang berhubungan dengan pendidikan antikorupsi.

2. Manfaat Praktis

Dari temuan ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi beberapa pihak sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

a. Sekolah

Membangun kehidupan sekolah khususnya SMA Negeri 3 Padang sebagai lingkungan bebas korupsi dengan mengembangkan kebiasaan dan pembelajaran antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari, serta membantu guru dalam mengembangkan pendidikan antikorupsi dan mengevaluasi implementasi pendidikan antikorupsi di sekolah.

b. Masyarakat

Memberi wawasan dan masukan kepada masyarakat tentang pentingnya penanaman nilai-nilai antikorupsi pada generasi muda mulai dari saat sekarang ini agar generasi muda nantinya memiliki sikap antikorupsi.

c. Pemerintah/Kemendikbud

Memberikan masukan bagi pemerintah tentang pelaksanaan penanaman nilai antikorupsi di sekolah yang belum optimal. Sehingga dapat menjadi acuan dalam mengambil langkah selanjutnya untuk mengoptimalkan peran pendidikan sebagai upaya pencegahan terjadinya korupsi di Indonesia.